

Evaluasi Program Pembelajaran Sejarah Indonesia di SMKN 57 Jakarta

Nur Fajar Absor¹, Kurniawati², Umasih³

¹ Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, ^{2,3} Universitas Negeri Jakarta

Email: [1nurfajarabsor@uhamka.ac.id](mailto:nurfajarabsor@uhamka.ac.id), [2kurniawati@unj.ac.id](mailto:kurniawati@unj.ac.id),
[3umasih@unj.ac.id](mailto:umasih@unj.ac.id)

Abstract: *This study aims to analyze the positive and negative impacts of the history learning program at SMKN 57 Jakarta. The research design used was an evaluation, consisting of the process of selecting an evaluation model and then selecting the research method. The research model itself, the researcher used Goal Free Evaluation Model developed by Michael Scriven, while for the research method, researchers used qualitative research methods. The sample used was the vice principal in the curriculum, teacher, and students. This study uses triangulation data collection techniques, namely observation, interview, key informants and specialist informants, and documentation. The results found that there were: (1) Positive impact in accordance with program makers' expectations around the program's goals which were understood from the cognitive aspect, students were interested in learning Sejarah Indonesia, and the implementation of learning had proceeded well; (2) Positive impacts that do not include program makers' goals around students to be active, creative, and critical in learning, creative and innovative learning methods and media, and the implant of character education; (3) Negative side effects as a result of programs implemented around the emergence of legal uncertainty in Indonesia, program objectives are understood to be limited to cognitive aspects, difficulties in making learning tools, learning materials are numerous and concise, and learning activities depend on the professionalism of the teacher.*

Keywords : *Program Evaluation, Goal Free Evaluation Model, Historical Learning*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak positif dan negatif dari program pembelajaran sejarah di SMKN 57 Jakarta. Desain penelitian yang digunakan adalah evaluasi yang terdiri dari proses pemilihan model evaluasi dan selanjutnya memilih metode penelitian yang digunakan. Model penelitiannya sendiri, peneliti menggunakan Model Evaluasi Bebas Tujuan (*Goal Free Evaluation Model*) yang dikembangkan oleh Michael Scriven, sedangkan untuk metode penelitiannya, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Sampel yang digunakan adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, dan peserta didik. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi, yakni observasi, wawancara, informan kunci dan informan spesialis, serta dokumentasi. Hasilnya ditemukan bahwa terdapat: (1) Dampak positif yang sesuai dengan harapan pembuat program seputar tujuan program yang dipahami dari aspek kognitif, peserta didik berminat untuk mempelajari Sejarah Indonesia, dan pelaksanaan pembelajaran sudah berlangsung dengan baik; (2) Dampak positif yang tidak termasuk tujuan pembuat program seputar peserta didik menjadi aktif,

kreatif, dan kritis dalam pembelajaran, penggunaan metode dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta penanaman pendidikan karakter; (3) Dampak sampingan negatif akibat dari program yang dilaksanakan seputar munculnya ketidakpastian hukum di Indonesia, tujuan program dipahami hanya sebatas pada aspek kognitif, kesulitan dalam membuat perangkat pembelajaran, materi pembelajaran banyak dan padat, serta kegiatan pembelajaran tergantung kepada profesionalitas guru.

Kata kunci : Evaluasi Program, Model Evaluasi Bebas Tujuan, Pembelajaran Sejarah.

PENDAHULUAN

Pendidikan Menengah Kejuruan merupakan salah satu jenis pendidikan menengah selain Pendidikan Menengah Umum. Terdapat dua bentuk Pendidikan Menengah Kejuruan, yakni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Konsep SMK sendiri adalah suatu pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003).

Ditinjau lebih lanjut, karakteristik SMK menekankan pada keterampilan melalui praktik-praktik yang nantinya dimiliki oleh peserta didik. Hal ini sesuai dengan rasionalisasi perubahan kurikulum dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 ke Kurikulum 2013 yang menyatakan bahwa "...mengupayakan agar sumberdaya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban" (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014).

Selain memiliki keterampilan, peserta didik SMK nantinya juga akan memiliki kompetensi sikap dan pengetahuan yang bisa diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu karakteristik Kurikulum 2013 yang menyatakan bahwa "Mengembangkan

keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat” (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014).

Kompetensi sikap menjadi hal yang ditekankan di dalam Kurikulum 2013, sehingga muncul konsep pendidikan karakter di dalam Kurikulum 2013 untuk menyelaraskan kembali norma agama, norma sosial, norma hukum, dan norma budaya Indonesia, khususnya bagi generasi muda. Lima nilai utama dalam pendidikan karakter yang diterapkan saat ini adalah (1) Religiositas; (2) Nasionalisme; (3) Kemandirian; (4) Gotong royong; (5) Integritas (Edy, Setyowati, & Wasino, 2018; “Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter,” n.d.). Salah satu nilai di dalam pendidikan karakter, yakni nasionalisme bisa didapatkan melalui mata pelajaran Sejarah Indonesia.

Menurut Kartodirdjo (dalam Gonggong, 2008), di tengah-tengah arus globalisasi yang ada saat ini perlu diandalkan nasionalisme dan identitas nasional, karena nasionalisme masih amat relevan bagi generasi muda dan masih banyak nilai yang belum terealisasi dari nilai-nilai tersebut, adapun identitas nasional perlu dipupuk pada generasi muda lewat kesadaran nasional yang perlu dibangkitkan melalui kesadaran sejarah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 mengenai struktur Kurikulum 2013 untuk Pendidikan Menengah mengalokasikan bahwa mata pelajaran Sejarah Indonesia mendapatkan 2 jam pelajaran masing-masing di kelas X, XI, dan XII yang

menandakan bahwa mata pelajaran Sejarah Indonesia merupakan mata pelajaran yang penting untuk mengakomodasi pendidikan karakter.

Namun, pada 7 Juni 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan bahwa struktur kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan mengalami perubahan. Perubahan struktur kurikulum sebetulnya sudah berlaku efektif pada Tahun Ajaran 2017/2018 dengan keluarnya SK Dirjen Dikdasmen No. 130/D/KEP/KR/2017 pada 10 Februari 2017. Namun, SK ini kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 07/D.D5/KK/2018 yang berlaku efektif pada Tahun Ajaran 2018/2019. Dalam tataran teknisnya, peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

Peraturan ini sendiri menimbulkan polemik ketika salah satu mata pelajaran wajib yang bermuatan nasional, yakni Sejarah Indonesia mengalami perubahan, karena saat ini mata pelajaran Sejarah Indonesia hanya mendapatkan 3 jam pelajaran di kelas X, sedangkan untuk kelas XI, XII, dan XIII tidak mempelajarinya (Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07/D.D5/KK/2018).

Selain itu, terjadi pemadatan materi mata pelajaran Sejarah Indonesia di lingkungan Pendidikan Menengah Kejuruan di kelas X yang hampir setara dengan materi mata pelajaran Sejarah Indonesia di lingkungan Pendidikan Menengah Umum dari kelas X-XII, yakni dimulai dari memahami konsep dasar sejarah, hingga materi mengevaluasi kehidupan Bangsa Indonesia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi pada era kemerdekaan (sejak proklamasi sampai dengan Reformasi) (Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 464/D.D5/KR/2018). Dengan demikian, pembelajaran Sejarah Indonesia di lingkungan SMK mengalami perubahan secara drastis.

Mengacu pada tulisan di atas, maka mata pelajaran Sejarah Indonesia menjadi penting untuk dipelajari oleh peserta didik, khususnya peserta didik yang ada di lingkungan SMK untuk mengembangkan pendidikan karakter mereka. Namun, muncul kekhawatiran bahwa pembelajaran pada mata pelajaran tersebut tidak efektif dilaksanakan karena perubahan struktur kurikulum yang menjadikan mata pelajaran Sejarah Indonesia hanya diberikan pada kelas X saja, sedangkan materi yang dipelajari menjadi padat.

Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program pembelajaran Sejarah Indonesia di SMK, khususnya di SMKN 57 Jakarta dengan fokusnya, yakni: (1) Untuk menganalisis dampak positif yang diharapkan dari pembuat program pembelajaran Sejarah Indonesia; (2) Untuk menganalisis dampak positif yang tidak termasuk tujuan dari pembuat program pembelajaran Sejarah Indonesia; (3) Untuk menganalisis dampak sampingan negatif program pembelajaran Sejarah Indonesia.

METODE

Peneliti menggunakan desain penelitian evaluasi yang terdiri dari proses pemilihan model evaluasi yang selanjutnya memilih metode penelitian yang digunakan (Wirawan, 2016). Peneliti menggunakan model penelitian berupa Model Evaluasi Bebas Tujuan (Goal Free Evaluation

Model) yang dikembangkan oleh Michael Scriven. Model ini harus menemukan tiga jenis pengaruh dari program yang dilaksanakan, yakni: (1) Mengidentifikasi pengaruh sampingan negatif; (2) Mengidentifikasi pengaruh positif dari program yang diharapkan; (3) Mengidentifikasi pengaruh sampingan positif yang tidak termasuk tujuan program (Wirawan, 2016). Sedangkan, untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

Untuk sampel yang digunakan, peneliti mengambil sampel atau informan yang ada di SMKN 57 Jakarta, yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, dan peserta didik. Adapun pemilihan tempat penelitian hanya di satu sekolah untuk mendapatkan kedalaman dari penelitian yang diteliti. Untuk teknik pengumpulan sampelnya, peneliti menggunakan *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa sampel atau informan yang peneliti ambil, yakni (1) Wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang berinisial Ibu A; (2) Guru yang berinisial Ibu S; (3) dan sepuluh peserta didik yang berinisial A, PA, CDA, AL, MY, H, PP, NA, DF, dan PZ dianggap paling tahu mengenai program pembelajaran sejarah di SMKN 57 Jakarta.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi (Sugiyono, 2018; Wirawan, 2016) dengan rinciannya adalah: (1) Observasi dengan opsi partisipasi moderat; (2) Wawancara dengan opsi terbuka; (3) Informan kunci berupa wakil kepala sekolah bidang kurikulum, sedangkan informan spesialisnya adalah guru, peserta didik, dan ahli yang berlatar belakang pendidikan sejarah; (4) Dokumentasi berupa peraturan-peraturan mengenai kurikulum, yakni Peraturan Dirjen

Dikdasmen No. 07/D.D5/KK/2018, silabus, dan RPP mata pelajaran Sejarah Indonesia.

Peneliti menggunakan teknik analisis data model Creswell dengan tahapan-tahapannya adalah (Sugiyono, 2018): (1) Mengorganisasikan dan Menyiapkan Data yang Akan Dianalisis; (2) Baca dan Lihat Seluruh Data; (3) Membuat Koding Seluruh Data; (4) Menggunakan Koding sebagai Bahan untuk Membuat Deskripsi; (5) Menghubungkan Antar Tema; (6) Memberi Interpretasi dan Makna Tentang Tema.

HASIL

Dampak Positif yang Diharapkan Pembuat Program

Tujuan pembelajaran Sejarah Indonesia adalah “memberikan pengetahuan tentang bangsa, bahasa, sikap sebagai bangsa, dan kemampuan penting untuk mengembangkan logika dan kehidupan pribadi dari peserta didik, masyarakat, dan bangsa” (Fadhillah dalam Haniah, 2017). Hal ini bisa ditafsirkan bahwa pembelajaran Sejarah Indonesia secara umum tidak hanya memberikan pengetahuan tentang bangsa saja, tetapi juga sikap sebagai bangsa. Sehingga, mata pelajaran Sejarah Indonesia tidak hanya membahas aspek kognitifnya saja, tetapi juga aspek afektifnya.

Ketika tujuan pembelajaran Sejarah Indonesia ditanyakan kepada guru, guru tersebut memahami bahwa Sejarah Indonesia bertujuan untuk membuat arif dan bijaksana, serta supaya tidak mengulang peristiwa masa lalu pada masa kini. Hal ini bisa disimpulkan bahwa guru hanya memahami tujuan dari pembelajaran Sejarah Indonesia dalam aspek afektif saja. Sedangkan, hanya tiga dari sepuluh peserta didik yang cukup

memahami tujuan dari pembelajaran Sejarah Indonesia dalam aspek kognitif dan afektif.

Sebanyak empat peserta didik berminat untuk mempelajari Sejarah Indonesia. Sedangkan, empat peserta didik lainnya mengatakan bahwa mereka berminat untuk mempelajari Sejarah Indonesia, namun hanya di materi-materi tertentu saja mereka tertarik untuk mempelajarinya. Namun, dua peserta didik lainnya tidak secara gamblang menyatakan keberminatannya mereka untuk mempelajari Sejarah Indonesia. Meski demikian, terlihat bahwa mata pelajaran Sejarah Indonesia diminati oleh peserta didik SMK Negeri 57 Jakarta.

Delapan peserta didik berpendapat bahwa pembelajaran Sejarah Indonesia yang telah dilaksanakan sudah berlangsung dengan baik. Ibu S juga banyak bercerita mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam sejarah sehingga peserta didik pun terlihat antusias untuk mendengarkan penjelasan dari Ibu S, selain itu Ibu S juga menyelingi pembelajarannya dengan candaan atau humor untuk mencairkan suasana.

Namun, dua peserta didik lainnya berpendapat bahwa pembelajaran Sejarah Indonesia belum berlangsung dengan baik. Dengan demikian, secara keseluruhan pembelajaran Sejarah Indonesia di SMK Negeri 57 Jakarta sudah berlangsung dengan baik.

Dampak Positif yang Tidak Termasuk Tujuan Pembuat Program

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru di SMK Negeri 57 Jakarta, diketahui bahwa pembelajaran Sejarah Indonesia saat ini peserta didik menjadi aktif, kreatif, dan kritis dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, selama pembelajaran berlangsung terlihat peserta didik aktif dalam

pembelajaran ketika Ibu S memberikan pertanyaan dan tugas kepada peserta didiknya, terutama peserta didik di kelas X Seni Karawitan.

Peserta didik pun menjadi kreatif ketika mengerjakan tugas yang diberikan kepada mereka dengan cara menggali informasi sendiri, meskipun tetap dibimbing oleh Ibu S. Terakhir, Ibu S menanamkan aspek berpikir secara kritis ketika memberikan macam-macam cerita di dalam pembelajarannya, karena Ibu S banyak memberikan latar belakang suatu peristiwa dan menghubungkannya dengan masa kini, serta memberikan makna yang ada di dalam peristiwa tersebut.

Pembelajaran Sejarah Indonesia di SMK Negeri 57 Jakarta menggunakan metode dan media pembelajaran yang kreatif, misalnya penggunaan power point untuk presentasi dan penggunaan film atau video dokumenter untuk menambah wawasan yang terkait dengan materi yang sedang dipelajari, karena Ibu S merasa apabila hanya menggunakan ceramah saja, akan membuat peserta didik menjadi bosan. Ibu S juga menggunakan gawainya dengan cara berkeliling untuk menampilkan gambar yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung.

Sedangkan, untuk metode pembelajaran pun sudah menggunakan metode pembelajaran yang kreatif, seperti melakukan tanya-jawab, membaca buku terlebih dahulu, dan pembagian tugas kelompok untuk kegiatan diskusi di kemudian hari. Walaupun demikian, Ibu S masih sering menggunakan metode ceramah dalam pembelajarannya, baik itu di depan kelas, maupun dengan cara berkeliling mendekati peserta didiknya.

Selama pembelajaran berlangsung, Ibu S terlihat beberapa kali melakukan penanaman pendidikan karakter secara tersirat yang mengandung berbagai nilai di dalamnya, seperti: (1) Menegur beberapa peserta didik yang menertawakan seorang peserta didik yang sedang berpendapat, hal ini dimaksudkan supaya peserta didik dapat menghargai pendapat seseorang; (2) Memberi penegasan kepada peserta didik untuk tidak bermain HP ketika jam pelajaran berlangsung, hal ini bertujuan supaya peserta didik fokus terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung; (3) Meminta peserta didik maju ke depan kelas untuk memaparkan tugasnya, hal ini bertujuan untuk memberanikan peserta didiknya berbicara di depan umum; (4) Bercerita mengenai mukjizat Nabi Musa yang dapat membelah lautan melalui tongkatnya, hal ini dibahas Ibu S dengan menyampaikan bahwa peristiwa pembelahan lautan tersebut merupakan kekuasaan Tuhan melalui Nabi Musa; (5) Bercerita bahwa kebangkrutan VOC akibat korupsi yang terjadi di dalam tubuh VOC, hal ini dihubungkan oleh Ibu S dengan kondisi Indonesia saat ini, sehingga sejarah tidak hanya bercerita tentang masa lalu, tetapi juga masa kini; (6) Mempersilakan ketua kelas untuk memimpin do'a bagi teman-temannya di akhir jam pelajaran sebelum pulang sekolah, hal ini bermaksud untuk mengamalkan ajaran agama yang dianut peserta didik; (7) Mengingatkan peserta didiknya untuk melakukan piket kelas dan ditunggu oleh Ibu S sampai kelas tersebut bersih dan rapi, hal ini menunjukkan Ibu S berharap peserta didiknya menjadi sosok yang disiplin dan peduli dengan cara bergotong-royong dan bekerjasama, serta bertanggung jawab terhadap tugasnya, semua ini ditunjukkan oleh Ibu S

melalui keteladanan dengan cara menunggu sampai kelas tersebut bersih dan rapi

Dampak Sampingan Negatif Program

Munculnya Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 07/D.D5/KK/2018 yang berkaitan dengan perubahan struktur kurikulum di SMK pada 7 Juni 2018 yang kemudian disusul dengan munculnya Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 464/D.D5/KR/2018 yang berkaitan dengan perubahan KD mata pelajaran yang ada di SMK pada 30 Agustus 2018 menimbulkan ketidakpastian hukum yang ada di Indonesia, terutama di bidang pendidikan.

Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 07/D.D5/KK/2018 yang didahului oleh Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 130/D/KEP/KR/2017 dan Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 464/D.D5/KR/2018 yang didahului oleh Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 330/D.D5/KEP/KR/2017 tidak tertera untuk mencabut peraturan yang ada sebelumnya, yakni Peraturan Mendikbud No. 24 Tahun 2016 tentang KI dan KD Pelajaran pada pendidikan dasar dan menengah. Padahal, di dalam Lampiran 46 tertera bahwa mata pelajaran Sejarah Indonesia di jenjang SMK dipelajari dari kelas X-XII.

Terlebih lagi, pada 14 Desember 2018 muncul Peraturan Mendikbud No. 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Mendikbud No. 24 Tahun 2016 yang menambah KI dan KD Informatika pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA. Di dalam peraturan tersebut, tertera bahwa mata pelajaran Sejarah Indonesia di jenjang SMK tetap dipelajari dari kelas X-XII. Peraturan ini pun keluar setelah Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 07/D.D5/KK/2018 dan Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 464/D.D5/KR/2018 muncul, sehingga seharusnya peraturan-peraturan Dirjen Dikdasmen

tersebut batal demi hukum dan tidak dilaksanakan di jenjang SMK saat ini.

Kembali ke tujuan pembelajaran Sejarah Indonesia yang dirumuskan bahwa untuk “memberikan pengetahuan tentang bangsa, bahasa, sikap sebagai bangsa, dan kemampuan penting untuk mengembangkan logika dan kehidupan pribadi dari peserta didik, masyarakat, dan bangsa” (Fadhillah dalam Haniah, 2017). Hal ini bisa ditafsirkan bahwa pembelajaran Sejarah Indonesia secara umum tidak hanya memberikan pengetahuan tentang bangsa saja, tetapi juga sikap sebagai bangsa. Sehingga, mata pelajaran Sejarah Indonesia tidak hanya membahas aspek kognitifnya saja, tetapi juga aspek afektifnya.

Namun, dengan pembelajaran Sejarah Indonesia yang berlangsung saat ini, tujuan dari pembelajaran Sejarah Indonesia cenderung hanya menekankan pada aspek kognitif saja. Hal ini bisa dilihat ketika tujuh peserta didik yang diwawancarai oleh peneliti, mereka memahami bahwa Sejarah Indonesia hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bangsa saja.

Kesulitan dalam membuat perangkat pembelajaran dirasakan oleh Ibu S sejak pergantian kurikulum dari KTSP ke Kurikulum 2013, karena sewaktu diadakan pelatihan Kurikulum 2013, Ibu S langsung diminta membuat RPP dengan hanya diberikan blankonya saja, sehingga membuat Ibu S kebingungan dalam membuat RPP berdasarkan Kurikulum 2013, bahkan berdasarkan penuturan Ibu S, instruktur saat itu berlatarbelakang bidang bahasa Indonesia, bukan berlatarbelakang bidang sejarah. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa dalam pelatihan Kurikulum

2013 saat itu terjadi permasalahan, terutama dalam pemilihan instuktur yang tidak sesuai dengan latar belakang bidangnya.

Selain itu, Ibu S juga menyampaikan bahwa dalam struktur kurikulum yang baru saat ini diterapkan di SMK, yakni berdasarkan Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 07/D.D5/KK/2018, tidak ada pelatihan yang diberikan berkaitan dengan pembuatan perangkat pembelajaran, pelatihan tersebut berakhir pada 2017. Padahal, dalam struktur kurikulum yang baru tersebut, terdapat perubahan KD dan jam mengajar, sehingga seharusnya terdapat pelatihan untuk membuat perangkat pembelajaran, seperti silabus dan RPP berdasarkan Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 07/D.D5/KK/2018.

Hal ini bisa dilihat dari silabus yang diberikan oleh Ibu S kepada peneliti tidak dibuat secara baik, karena di dalam silabus tersebut hanya menerangkan materi sampai Kerajaan Hindu-Buddha saja, selain itu terlihat bahwa di dalam silabus tersebut terindikasi salin-tempel atau *copy-paste*, karena adanya materi mata pelajaran Bahasa Indonesia dan yang tercantum sebagai guru mata pelajaran di dalam silabus tersebut adalah Ibu A, bukan Ibu S. Selain itu, RPP yang dibuat oleh Ibu S terdiri dari 18 RPP, padahal KD yang ada di dalam Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 464/D.D5/KR/2018 terdiri dari 13 KD.

Materi di dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia saat ini terlihat banyak dan padat, karena dimulai dari materi memahami konsep dasar sejarah, hingga materi mengevaluasi kehidupan Bangsa Indonesia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era kemerdekaan (sejak proklamasi sampai dengan Reformasi) (Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 464/D.D5/KR/2018). Selain itu, tujuh peserta didik menyatakan bahwa materi di dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia banyak yang harus dipelajari.

Aspek penting selama kegiatan pembelajaran berlangsung adalah profesionalitas guru. Hal ini bisa dilihat dari perancangan perangkat pembelajaran, seperti silabus dan RPP. Terlihat bahwa Ibu S tidak mempersiapkan dengan baik pembuatan silabusnya, karena terindikasi salin-tempel atau *copy-paste*, yakni adanya materi mata pelajaran Bahasa Indonesia dan yang tercantum sebagai guru mata pelajaran di dalam silabus tersebut adalah Ibu A, bukan Ibu S. Selain itu, RPP yang dibuat oleh Ibu S terdiri dari 18 RPP, padahal KD yang ada di dalam Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 464/D.D5/KR/2018 terdiri dari 13 KD.

Selain itu, beberapa kegiatan/peraturan sekolah yang membuat pembelajaran Sejarah Indonesia belum berlangsung secara efektif, mengharuskan Ibu S mengelola kegiatan pembelajaran dengan baik, karena dengan waktu yang tersedia, Ibu S harus menyampaikan 13 KD selama satu tahun ajar. Sementara itu yang terjadi di lapangan adalah dalam dua pertemuan awal di semester ganjil ini, peserta didik di kelas X Jasa Boga 1 dan X Seni Karawitan baru dapat mempelajari 'Pengertian Sejarah' secara dasar saja, belum masuk ke materi 'Konsep Dasar Sejarah' yang berhubungan dengan 'berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu serta perubahan dan keberlanjutan'. Padahal, masih banyak KD berikutnya yang belum dipelajari peserta didik dalam tahun ajaran ini.

PEMBAHASAN

Dampak Positif yang Diharapkan Pembuat Program

Tujuan pembelajaran Sejarah Indonesia dirumuskan sebagai “memberikan pengetahuan tentang bangsa, bahasa, sikap sebagai bangsa, dan kemampuan penting untuk mengembangkan logika dan kehidupan pribadi dari peserta didik, masyarakat, dan bangsa” (Fadhillah dalam Haniah, 2017). Namun, hasil yang didapatkan dari wawancara dengan guru dan peserta didik di SMK Negeri 57 Jakarta ditemukan bahwa mereka tidak memahami secara utuh tujuan yang dirumuskan di dalam pembelajaran Sejarah Indonesia.

Keberminatan peserta didik dalam mempelajari Sejarah Indonesia menjadi salah satu aspek penting untuk mengetahui keinginan peserta didik tersebut dalam mempelajari Sejarah Indonesia. Diketahui bahwa dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sebanyak delapan peserta didik berminat untuk mempelajari Sejarah Indonesia, meskipun empat di antaranya memberikan syarat bahwa mereka berminat terhadap materi-materi tertentu saja dalam mempelajari Sejarah Indonesia. Keberminatan peserta didik ini perlu dijaga, sehingga diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik dan tidak ada lagi citra bahwa pelajaran sejarah adalah pelajaran yang membosankan (Putra, 2013).

Pelaksanaan pembelajaran juga menjadi aspek penting lainnya untuk mengetahui pembelajaran Sejarah Indonesia sudah berlangsung dengan baik atau belum. Berdasarkan wawancara kepada peserta didik yang mengalami kegiatan pembelajaran secara langsung menyatakan bahwa pembelajaran Sejarah Indonesia yang telah dilaksanakan sejauh ini sudah berlangsung dengan baik.

Peneliti pun melihat secara langsung bahwa pembelajaran Sejarah Indonesia sudah berlangsung dengan baik, hal ini bisa dilihat dari antusiasme peserta didik untuk mendengarkan penjelasan dari cerita-cerita yang disampaikan oleh Ibu S dan juga Ibu S menyelengi pembelajarannya dengan candaan atau humor untuk mencairkan suasana. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan strategi pembelajaran yang diselengi dengan humor tersebut efektif untuk memberikan pengaruh terhadap minat belajar peserta didik (Bolkan, Griffin, & Goodboy, 2018; Saenab, Nurhayati, Hamka, & Fitri, 2016; Wulandari & Duryati, 2014). Sehingga, langkah yang diambil oleh Ibu S sudah tepat untuk dilaksanakan di dalam pembelajaran Sejarah Indonesia.

Dampak Positif yang Tidak Termasuk Tujuan Pembuat

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan observasi di kelas, ditemukan bahwa pembelajaran Sejarah Indonesia yang berlangsung saat ini peserta didik menjadi aktif, kreatif, dan kritis. Hal tersebut tidak terlepas dari konsep di dalam Kurikulum 2013 mengenai pembelajaran yang berpusat pada aktivitas peserta didik atau '*student-centered learning*' dan penggunaan metode pembelajaran *discovery learning* atau '*pembelajaran penemuan*' (Sinambela, 2013). Pembelajaran Sejarah Indonesia dalam Kurikulum 2013 pun harus menjadikan peserta didik aktif dan kreatif, serta mengembangkan berpikir secara kritis (Hasan, 2013; F. H. Santosa, Umasih, & Sarkadi, 2012; Y. B. Santosa, Erwin, Winarsih, & Sarkadi, 2017; Supriatna, 2019).

Hal ini semakin berkembang ketika pembelajaran Sejarah Indonesia saat ini dengan materi yang banyak dan padat membuat guru mencoba untuk melibatkan peserta didik secara lebih aktif dan membuat pemikiran

mereka menjadi semakin kreatif dan kritis dengan menggunakan berbagai macam metode dan media pembelajaran yang telah dilakukan.

Ibu S yang sudah menggunakan metode dan media pembelajaran yang kreatif sesuai dengan pembelajaran di dalam Kurikulum 2013 yang membuat guru harus kreatif dalam menggunakan metode dan media pada saat kegiatan pembelajaran (Nurdyansyah; Fahyuni, 2016; Rahelly, 2015). Hal ini semakin berkembang ketika pembelajaran Sejarah Indonesia saat ini dengan materi yang banyak dan padat membuat guru mencoba untuk menggunakan berbagai macam metode dan media pada saat kegiatan pembelajaran. Namun, untuk ke depannya diharapkan Ibu S lebih banyak lagi menggunakan metode dan media lainnya pada saat kegiatan pembelajaran.

Seperti yang sudah disebutkan di dalam hasil penelitian bahwa Ibu S terlihat beberapa kali melakukan penanaman pendidikan karakter secara tersirat yang mengandung berbagai nilai di dalamnya selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Hal ini sesuai dengan konsep pendidikan karakter yang ada di dalam Kurikulum 2013 yang bertujuan untuk menyalurkan kembali norma agama, norma sosial, norma hukum, dan norma budaya Indonesia, khususnya bagi generasi muda (Edy et al., 2018). Terlebih lagi, pendidikan sejarah memiliki kontribusi tinggi terhadap pendidikan budaya dan karakter bangsa (Hasan, 2012). Hal ini bisa didapat melalui contoh-contoh peristiwa dan biografi tokoh yang sarat dengan makna dan nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan (Umasih, 2016).

Dampak Sampingan Negatif Program

Secara eksplisit, Peraturan Menteri tidak tercantum di dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, namun dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tertera bahwa menteri berhak membuat peraturan sepanjang “diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan” (Saraswati, 2013). Menteri juga merupakan pembantu presiden, sehingga “mempunyai kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya melalui Peraturan Menteri” (Saraswati, 2013). Menteri juga memiliki jajaran Dirjen yang berfungsi untuk membantu tugas-tugas menteri.

Dengan demikian, munculnya Peraturan Mendikbud No. 37 Tahun 2018 menggugurkan peraturan-peraturan Dirjen Dikdasmen yang secara hierarkis berada di bawahnya dan telah muncul sebelumnya, yakni Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 07/D.D5/KK/2018 dan Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 464/D.D5/KR/2018. Oleh karena itu, seharusnya peraturan-peraturan Dirjen Dikdasmen tersebut batal demi hukum dan tidak dilaksanakan di jenjang SMK saat ini, sehingga mata pelajaran Sejarah Indonesia di jenjang SMK tetap dipelajari dari kelas X-XII.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada peserta didik menunjukkan bahwa sebanyak tujuh peserta didik memahami Sejarah Indonesia hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bangsa saja, yakni dari aspek kognitif saja. Padahal, menurut Hasan (2019) yang terutama dikembangkan di dalam pembelajaran Sejarah Indonesia

adalah mengarah kepada aspek afektif, yakni nilai-nilai kebangsaan, semangat kebangsaan, sikap kebangsaan, dan sebagainya.

Hal ini diperkuat oleh pendapat Suswandari (2019) yang menyatakan bahwa secara filosofi, pembelajaran Sejarah Indonesia menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang harapannya akan menguatkan identitas kebangsaan peserta didik, terutama di jenjang SMK, bukan sejarah sebagai ilmu sebagaimana yang dipelajari di jenjang SMA. Maka dari itu, "harus ada perubahan paradigma pembelajaran sejarah dari situasi linier hapalan ke arah pemahaman makna moral kesejarahan" (Suswandari, 2010).

Terlebih lagi, menurut Hasan (2019) bahwasannya tingkatan tertinggi dari afektif itu adalah karakter, maka dari itu dengan mempelajari Sejarah Indonesia diharapkan peserta didik memiliki berbagai macam karakter yang berkaitan erat dengan pendidikan karakter yang ada di dalam Kurikulum 2013. Bahkan, Joesoef (2018) menekankan betapa pentingnya pendidikan karakter, karena apabila peserta didik tanpa memiliki karakter yang baik, ia akan lebih mirip dengan "a well trained dog than a harmoniously developed person", yakni anjing yang terlatih dengan baik daripada orang yang berkembang secara harmonis.

Sehingga, dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas, menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran Sejarah Indonesia tidak hanya sebatas pada aspek kognitif saja, akan tetapi aspek afektif juga menjadi sesuatu hal yang penting dan sejalan dengan aspek kognitifnya. Hal ini bisa disimpulkan bahwa dengan mempelajari Sejarah Indonesia diharapkan peserta didik nantinya akan memiliki berbagai macam karakter yang

berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan atau dalam nilai utama pada pendidikan karakter disebut sebagai nasionalisme.

Berdasarkan pernyataan Ibu S yang menyatakan bahwa pelatihan pembuatan perangkat pembelajaran, yakni RPP pada saat pergantian kurikulum dari KTSP ke Kurikulum 2013 tidak berjalan efektif, karena langsung diminta membuat RPP dengan hanya diberikan blankonya saja membuat permasalahan seputar kesiapan pembelajaran dalam Kurikulum 2013 menjadi sulit untuk diterapkan. Terlebih lagi, instruktur yang ada saat itu berlatarbelakang bidang bahasa Indonesia, bukan berlatarbelakang bidang sejarah.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Hasan (2019) bahwa pelatihan guru di dalam Kurikulum 2013 perlu diperbaiki, karena Hasan yang merupakan Ketua Tim Perumus dan Pengembang Kurikulum 2013 tidak pernah dihubungi oleh instruktur pelatihan mengenai isi dari Kurikulum 2013, terutama mengenai KD yang sudah dirumuskan oleh tim perumus dan pengembang kurikulum. Permasalahan selanjutnya adalah banyaknya instruktur, terutama untuk mata pelajaran sejarah, baik itu Sejarah Indonesia maupun Sejarah bukan berlatarbelakang bidang sejarah.

Keadaan ini bertambah pelik ketika tidak ada pelatihan yang diberikan berkaitan dengan pembuatan perangkat pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum yang baru saat ini diterapkan di SMK, yakni Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 07/D.D5/KK/2018. Sehingga, guru sebagai pelaksana kurikulum sudah mengalami kesulitan mulai dari aktivitas merancang kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 464/D.D5/KR/2018, diketahui bahwa KD yang ada di dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia

terdiri dari 13 KD, sedangkan waktu yang dialokasikan untuk pembelajaran Sejarah Indonesia terdiri dari 32 pertemuan yang sebenarnya tidak seluruhnya efektif, karena terpotong oleh UTS, UAS, kegiatan sekolah, dan hari libur. Selain itu, pernyataan dari guru dan peserta didik menguatkan pandangan bahwa materi pembelajaran Sejarah Indonesia banyak dan padat.

Hal ini bisa dijadikan momen untuk mengkaji ulang terhadap materi-materi pembelajaran Sejarah Indonesia yang perlu dipelajari oleh peserta didik di SMK, karena bisa saja untuk peserta didik di SMK tidak perlu lagi materi-materi pembelajaran Sejarah Indonesia dipelajari secara kronologis, tetapi secara tematik, misalnya mengenai maritim, Revolusi Industri atau budaya. Kajian ulang ini bisa dilakukan dengan cara berdiskusi antara pemerintah, guru-guru, Perguruan Tinggi, dan sejarawan (Kusuma, 2019; Suswandari, 2019). Sehingga, mata pelajaran Sejarah Indonesia tidak lagi berisi materi yang banyak dan padat di SMK.

Beberapa temuan di lapangan yang didapatkan oleh peneliti mengenai aspek profesionalitas guru, yakni: (1) Silabus tidak dipersiapkan dengan baik karena terindikasi salin-tempel atau copy-paste; (2) RPP yang tidak sesuai dengan KD yang ada di dalam Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 464/D.D5/KR/2018; (3) Dua pertemuan awal di semester ganjil ini, peserta didik baru dapat mempelajari 'Pengertian Sejarah' secara dasar saja, belum masuk ke materi 'Konsep Dasar Sejarah'. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa masih terdapat kendala dari guru untuk dapat melangsungkan pembelajaran Sejarah Indonesia secara efektif. Hal ini senada dengan pernyataan Hasan (2019), Kusuma (2019), dan Suswandari

(2019) bahwa berlangsungnya pembelajaran Sejarah Indonesia tergantung kepada aspek profesionalitas guru.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi program pembelajaran Sejarah Indonesia di SMK Negeri 57 Jakarta dapat disimpulkan bahwa: (1) Terdapat dampak positif yang sesuai dengan harapan pembuat program; (2) Terdapat dampak positif yang tidak termasuk tujuan pembuat program; (3) Terdapat dampak sampingan negatif akibat dari program yang dilaksanakan, terutama terkait dengan ketidakpastian hukum di Indonesia akibat dari munculnya Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 07/D.D5/KK/2018 dan Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 464/D.D5/KR/2018 yang bertolak belakang dengan peraturan di atasnya, yakni Peraturan Mendikbud No. 37 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa mata pelajaran Sejarah Indonesia di jenjang SMK dipelajari dari kelas X-XII. Maka dari itu, pemerintah perlu menertibkan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang secara hierarkis berada di atasnya. Selain itu, pemerintah dalam hal ini Dirjen Dikdasmen perlu membuat suatu kajian bersama yang mengundang guru-guru, Perguruan Tinggi, dan sejarawan untuk membahas arah pembelajaran Sejarah Indonesia di SMK pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bolkan, S., Griffin, D. J., & Goodboy, A. K. (2018). Humor in the Classroom: The Effects of Integrated Humor on Student Learning. *Communication Education, 67*(2), 144–164. <https://doi.org/10.1080/03634523.2017.1413199>
- [2] Edy, A. N., Setyowati, D. L., & Wasino. (2018). Implementation of

Character Education through Nationality Historical Learning in SMK Negeri Karangdadap Pekalongan Regency. *Journal of Educational Social Studies*, 7(1), 61–66. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess/article/view/22586/10736>

- [3] Gonggong, A. (2008). Sartono Kartodirdjo: Keprihatinan Seorang Guru Besar dan Sikap Asketis. In M. Nursam, B. T. Wardaya, & A. W. Adam (Eds.), *Sejarah yang Memihak: Mengenang Sartono Kartodirdjo*. Yogyakarta: Ombak.
- [4] Haniah, A. R. (2017). Pelaksanaan pembelajaran sejarah dengan kurikulum 2013 di sma negeri 2 wates diy. *E-Jurnal*, 625–644.
- [5] Hasan, S. H. (2012). Pendidikan Sejarah Untuk Memperkuat Pendidikan Karakter. *Paramita: Historical Studies Journal*, 22(1). <https://doi.org/10.15294/paramita.v22i1.1875>
- [6] Hasan, S. H. (2013). History Education in Curriculum 2013: a New Approach To Teaching History. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 14(1), 163. <https://doi.org/10.17509/historia.v14i1.2023>
- [7] Hasan, S. H. (2019). *Pembelajaran Sejarah Indonesia di SMK Berdasarkan Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 07/D.D5/KK/2018*.
- [8] Joesoef, D. (2018). *Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya: Buah-buah Refleksi Daoed Joesoef untuk Membumikan Pembangunan Nasional* (R. B. . A. Nugroho, Ed.). Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- [9] Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter. (n.d.). Retrieved from Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan website: http://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/?page_id=132
- [10] *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 130/D/KEP/KR/2017*.
- [11] Kusuma, S. P. (2019). *Pembelajaran Sejarah Indonesia di SMK Berdasarkan Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 07/D.D5/KK/2018*.
- [12] Nurdyansyah; Fahyuni, E. F. (2016). *Inovasi Model Pembelajaran*

Sesuai Kurikulum 2013. Retrieved from
<http://eprints.umsida.ac.id/296/>

- [13] *Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07/D.D5/KK/2018.*
- [14] *Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 464/D.D5/KR/2018.*
- [15] *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014.*
- [16] *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016.*
- [17] *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018.*
- [18] Putra, I. E. (2013). Teknologi Media Pembelajaran Sejarah Melalui Pemanfaatan Multimedia Animasi Interaktif. *Jurnal TEKNOIF*, 1(2), 20–25. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPS/article/view/3620/2914>
- [19] Rahelly, Y. (2015). Media Pembelajaran Sejarah dalam Kurikulum 2013. *Jurnal Criksetra*, 4(7), 92–98. Retrieved from <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/criksetra/article/download/4779/2523>
- [20] Saenab, S., Nurhayati, B., Hamka, L., & Fitri, S. R. (2016). Pembelajaran Genetika (Susah) Dengan Strategi Humor (Mudah), Apakah Mempengaruhi Minat Siswa? *Jurnal Nalar Pendidikan*, 4(2), 131–136. Retrieved from <http://ojs.unm.ac.id/nalar/article/view/2414/1892>
- [21] Santosa, F. H., Umasih, & Sarkadi. (2012). Pengaruh Model Pembelajaran dan Kemampuan Berpikir Kritis Terhadap Hasil Belajar Sejarah Siswa di SMA Negeri 1 Pandeglang. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 20(1), 13–27. <https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2012.04.015>
- [22] Santosa, Y. B., Erwin, T. N., Winarsih, M., & Sarkadi. (2017). Pengaruh Metode Pembelajaran dan Kemampuan Berpikir Kreatif Terhadap Hasil Belajar Sejarah Siswa di SMA Negeri 5 Depok Kelas 11 IPS. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 6(2), 19.

<https://doi.org/10.21009/jps.062.03>

- [23] Saraswati, R. (2013). Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Yustisia*, 2(3), 97–103. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10164/9062>
- [24] Sinambela, P. N. J. M. (2013). Kurikulum 2013 dan Implementasinya dalam Pembelajaran. *Generasi Kampus*, 6(2), 17–29. Retrieved from <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/view/7085/6067>
- [25] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- [26] Supriatna, N. (2019). Pengembangan Kreativitas Imajinatif Abad Ke-21 Dalam Pembelajaran Sejarah. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 2(2), 73. <https://doi.org/10.17509/historia.v2i2.16629>
- [27] Suswandari. (2010). Paradigma Pendidikan Sejarah Dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 1(1), 331–342. <https://doi.org/10.21831/cp.v1i1.216>
- [28] Suswandari. (2019). *Pembelajaran Sejarah Indonesia di SMK Berdasarkan Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 07/D.D5/KK/2018*.
- [29] Umasih. (2016). Peran Strategis Pendidikan Sejarah Dalam Pembentukan Karakter Bangsa. *Seminar Nasional Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global*, 475–484. Retrieved from <http://ojs.unm.ac.id/PSN-HSIS/article/view/4083/2447>
- [30] *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003*.
- [31] Wirawan. (2016). *Evaluasi: Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [32] Wulandari, N., & Duryati. (2014). Efektivitas Strategi Mengajar Menggunakan Humor dalam Meningkatkan Prestasi Siswa pada Pelajaran Matematika. *Jurnal RAP UNP*, 5(1), 53–61. Retrieved from <https://doi.org/10.24036/rapun.v5i1.6640%09>